

Judul : Jumlah Komisi di DPR Akan Bertambah
Tanggal : Rabu, 25 September 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Jumlah Komisi di DPR Akan Bertambah

Rencana penambahan kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran akan berdampak pada penambahan komisi di DPR, yakni untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah dan legislatif.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat tengah mengkaji adanya penambahan komisi di DPR menyusul rencana penambahan jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang. Namun, penambahan komisi DPR ini dikhawatirkan justru bakal membengkakkan anggaran serta menjadi ajang bagi-bagi kursi pimpinan komisi. Efektivitas dan efisiensi kerja anggota Dewan ke depan pun rentan terganggu.

Komisi merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Pada periode 2019-2024, DPR memiliki 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan mitra

kerja masing-masing.

Jumlah komisi DPR pun ditetapkan oleh DPR pada masa awal keanggotaan DPR. Kemudian, susunan dan anggota komisi juga bakal ditentukan secara proporsional berdasarkan perimbangan dan pemetaan jumlah anggota setiap fraksi partai politik yang ada di parlemen.

Ketua DPR Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/9/2024), mengatakan, penambahan komisi DPR tengah dimatangkan. Ia tak memungkiri bahwa rencana penambahan kementerian pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan berdampak pada penambahan komisi di DPR, untuk

memperkuat kemitraan antara pemerintah dan legislatif.

"Jadi, akan ada kemungkinan juga penambahan komisi jika memang ada penambahan kementerian. Itu kami godok dan akan kami laksanakan sesuai dengan mekanismenya," ujar Puan.

Saat ditanya bagaimana mencegah agar penambahan komisi DPR ini tidak menjadi ajang bagi-bagi kursi pimpinan komisi, Puan kembali menegaskan bahwa penetapan pimpinan komisi DPR akan dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Susunan pimpinan komisi DPR juga akan diputuskan secara musyawarah dan mufakat antarfraksi partai di parlemen.

Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus pun menyampaikan

bahwa jumlah komisi DPR sekarang pasti berkembang. Ada sejumlah alasan. Pertama, ada komisi yang sekarang beban tugasnya terlalu berat. Kedua, rencana penambahan badan dan lembaga kementerian.

"Contoh, yang sekarang (memiliki) beban tugas yang berat itu adalah di Komisi IV. Cukup banyak," ujar Lodewijk.

Saat ini Komisi IV DPR memiliki mitra kerja meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, serta Badan Pangan Nasional.

Politisi senior Golkar di parlemen, Bambang Soesatyo, menambahkan, langkah pemerin-

tahan harus diikuti dengan langkah di parlemen. Oleh karena itu, ia mendukung jika penambahan komisi di DPR disesuaikan dengan penambahan jumlah kementerian atau lembaga. "Kan, untuk lebih melancarkan tugas-tugas eksekutif dalam lima tahun ke depan," ucap Bambang.

Ia membantah jika penambahan komisi DPR ini berkaitan dengan bagi-bagi "kue kekuasaan" mendatang. Menurut dia, susunan pimpinan komisi bakal ditentukan sesuai porsi yang berdasarkan jumlah kursi di parlemen. "Jadi, bukan bagi-bagi jabatan," ujarnya.

Konsekuensi politik

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional

(BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai, wacana penambahan komisi DPR merupakan konsekuensi politik dari membesarnya komposisi parpol dalam koalisi Prabowo-Gibran, Koalisi Indonesia Maju (KIM) di DPR. Parpol yang tergabung di KIM ialah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat.

"Meski demikian, membesarnya kelengkapan Dewan atau komisi juga perlu disikapi hati-hati karena pertimbangan penambahan anggaran," tutur Wasisto.

Menurut Wasisto, bukan tidak mungkin penambahan komisi ini membuka peluang bagi-bagi jabatan karena setiap partai akan berebut menjadi pimpinan komisi. "Saya pikir

ada potensi mengarah pada akomodasi politik yang merata, baik di legislatif maupun eksekutif," kata Wasisto.

Di sisi lain, ia juga melihat ada kekhawatiran terganggunya efektivitas dan efisiensi kerja anggota Dewan ke depan. Sebab, dengan adanya penambahan komisi, setiap anggota Dewan nantinya juga akan merangkap tugas di banyak komisi. Hal ini tentu tidak akan menjamin produktivitas kerja mereka. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, capaian Program Legislasi Nasional juga tidak maksimal.

"Hal ini yang perlu digarisbawahi untuk ditingkatkan, bukan penambahan kelengkapan Dewan," ujar Wasisto.

(BOW/NIA/WLD)